

	News Title : Kemendag: Bursa Berjangka CPO Ditargetkan Mulai Efektif Juni 2023	
	Media Name : Wartaekonomi.co.id	Journalist : Istimewa
	Publish Date : 03 March 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

Kemendag: Bursa Berjangka CPO Ditargetkan Mulai Efektif Juni 2023

Jum'at, 03 Maret 2023, 10:50 WIB



Kredit Foto: Sufri Yulardi

Warta Ekonomi, Jakarta - Indonesia merupakan produsen **minyak sawit mentah** (*crude palm oil/CPO*) terbesar di dunia sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki harga acuan CPO sendiri.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didid Noordiatmoko, dalam Seminar *Hybrid* Majalah Sawit Indonesia bertemakan 'Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia' pada Kamis (2 Maret 2023), mengatakan strategi membentuk harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit dalam negeri. Oleh karena itu, Kemendag tengah menyusun aturan baru yang akan mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditas.

Lebih lanjut dikatakan Didid, aturan tersebut masih digodok dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan eksportir.

Lalu, akan dikaji pula produk CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. Peranan Bappebti membentuk referensi harga komoditas di Indonesia sebagaimana amanat UU Nomor 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Didid menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata niaga CPO. Sebab, selama ini terdapat perbedaan data ekspor sawit. Perbedaan tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan negara dari ekspor **sawit** kurang optimal.

Didid menyebut kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan memudahkan pemerintah menetapkan neraca komoditas CPO. Hal ini agar kejadian kelangkaan bahan baku CPO untuk minyak goreng tidak terulang.

Dia mencontohkan produksi CPO sebanyak 50 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, kebutuhan untuk konsumsi dan sejenisnya kira-kira 3 juta ton. Lalu, kebutuhan untuk pengolahan turunan CPO sekitar 6 juta ton. Kebutuhan biodiesel dan sebagainya sekitar 14 juta ton sehingga kebutuhan domestik sekitar 23 juta ton. Berarti, maksimal ekspor yang bisa diizinkan adalah sekitar 27 juta ton. Selain itu, Didid menyebut saat ini pihaknya masih menyiapkan insentif untuk pelaku usaha karena adanya kewajiban ekspor melalui bursa berjangka. Misalnya terkait perpajakan, baik Pajak Penghasilan (PPH), maupun di Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta juga biaya transaksi.

Lebih lanjut, Didid menerangkan, saat ini baru ada dua bursa berjangka komoditi yang telah memiliki izin yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Kemendag menargetkan bursa berjangka untuk CPO mulai efektif pada Juni 2023.

Meskipun *price discovery*-nya akan muncul sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah diterapkan.

"Harapannya akhir tahun ini kita sudah memiliki *price reference* untuk CPO, namun mencapai *price reference* itu kita harus pastikan CPO itu masuk bursa (berjangka) di bulan Juni (2023)," kata Didid.